

Kajian Peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Menangani Dampak *Urban Sprawl* di Kecamatan Cibiru Kota Bandung Guna Keberlanjutan Lingkungan Perkotaan

Hapsah Rahmawati^{*}, Ernady Syaodih

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*hapsahrahmawati@gmail.com, ernadysyaodih@yahoo.com

Abstract. This study was preceded by the emergence of urban problems, namely the urban sprawl phenomenon. Urban problems such as urban sprawl can have an impact on the environment so that it demands a concept that needs to be applied and prioritized in current development in order to realize sustainable development. Environmental problems are caused by the increasing population growth in urban areas. In addition, there is a need for a study related to the role of stakeholders in efforts to handle urban sprawl in order to determine the extent of the performance of the Bandung City Government in dealing with the impacts arising from this phenomenon. These things motivated the author to conduct a study related to the role of regional apparatus organizations (OPD) in dealing with the impact of urban sprawl in Cibiru District. This study also aims to identify the impact of the urban sprawl phenomenon in Cibiru District, Bandung City and the role of stakeholders in dealing with the impact of the urban sprawl phenomenon in Cibiru District. The analytical method used in this research is descriptive qualitative analysis and MACTOR method. With this method, the impact of the urban sprawl phenomenon in Cibiru District can be identified, namely the emergence of floods and landslides. Also, the identification of 3 (three) main actors who have the highest influence in dealing with urban sprawl in Cibiru District, namely the Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung; Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung; and Kecamatan Cibiru.

Keywords: *Regional Apparatus Organization (OPD), Urban Sprawl, MACTOR.*

Abstrak. Studi ini didahului dengan timbulnya permasalahan perkotaan yaitu fenomena urban sprawl. Permasalahan perkotaan seperti urban sprawl dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan sehingga menuntut adanya sebuah konsep yang perlu diterapkan dan diutamakan dalam pembangunan saat ini agar terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Permasalahan lingkungan diakibatkan dari pertumbuhan penduduk di perkotaan semakin tinggi. Selain itu, perlu adanya kajian terkait peran stakeholder dalam upaya penanganan urban sprawl guna mengetahui sejauh mana kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam menangani dampak yang timbul akibat fenomena tersebut. Hal-hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan kajian terkait peran organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menangani dampak urban sprawl di Kecamatan Cibiru. Studi ini pun bertujuan Mengidentifikasi dampak dari adanya fenomena urban sprawl di Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan peran stakeholder dalam menangani dampak dari fenomena urban sprawl di Kecamatan Cibiru. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif dan metode MACTOR. Dengan metode tersebut, dapat teridentifikasi dampak dari fenomena urban sprawl di Kecamatan Cibiru yaitu timbulnya banjir dan longsor. Serta, teridentifikasinya 3(Tiga) aktor utama yang memiliki pengaruh tertinggi dalam menangani urban sprawl di Kecamatan Cibiru yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung; Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung; dan Kecamatan Cibiru.

Kata Kunci: *Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Urban Sprawl, MACTOR.*

A. Pendahuluan

Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) mengeluarkan program pembangunan berkelanjutan dan diberi nama Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan kebijakan global yang berkesinambungan. Tujuan nomor 11 dalam Sustainable Development Goals (SDGs) berbunyi “Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan” yang artinya program ini memiliki tujuan untuk menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan (Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017, 2017).

Menurut Ditjen Cipta Karya, kota relatif dengan padat penduduknya, lahan yang terbatas, umumnya non – agraris dan kepadatan populasi yang relatif tinggi, di mana sekelompok orang dalam jumlah tertentu dan dalam area geografis tertentu biasanya memelihara hubungan rasional, ekonomi dan individualistis. Permasalahan lingkungan perkotaan menuntut adanya sebuah konsep yang perlu diterapkan dan diutamakan dalam pembangunan saat ini, yaitu pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Kota Bandung telah merencanakan suatu konsep perencanaan kota guna mewujudkan keberlanjutan lingkungan perkotaan untuk masa yang akan datang. Konsep tersebut dijelaskan dalam dokumen “Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011 – 2031” yaitu konsep kota kompak.

Menurut (Widiawaty et al., 2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Tipologi Urban sprawl Di Kota Bandung Menggunakan Sistem Informasi Geografis” dapat disimpulkan bahwa adanya fenomena urban sprawl yang diakibatkan oleh laju urbanisasi yang tinggi di kawasan perkotaan Kota Bandung. Dari tahun 2005 hingga 2018, peningkatan urban sprawl di Kota Bandung mencapai 115,38 persen. Secara umum, peningkatan fenomena urban sprawl terjadi begitu pesat terutama pada bagian timur Kota Bandung yang menandakan perkembangan Kota Bandung terus berlangsung hingga ke wilayah sub-urban di sekitarnya.

Indikasi perluasan kawasan terbangun di Kecamatan Cibiru memang berdampak terhadap meningkatnya jumlah penduduk karena pada kondisi aktualnya Kecamatan Cibiru pada tahun 2021 memiliki jumlah penduduk sebanyak 75.297 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 11.530,93 km²/jiwa. Selain itu, dampak lainnya bisa dilihat dari beberapa fenomena lainnya seperti banjir dan longsor. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa fenomena banjir dan longsor yang terjadi di Kecamatan Cibiru bermula dari berkembangnya kawasan permukiman yang mengakibatkan minimnya resapan air di kawasan hulu dan tingkat erosi di Kecamatan Cibiru semakin tinggi.

Dengan adanya dampak serta permasalahan yang timbul akibat fenomena urban sprawl di Kecamatan Cibiru serta dipadukan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) di atas, maka konsep kota kompak sudah cukup untuk mendukung peningkatan kualitas tata kota di Kota Bandung. Namun, dalam penerapan pendekatan konsep kota kompak perlu adanya kajian terkait peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya menangani dampak urban sprawl tersebut guna mengetahui sejauh mana kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam menangani fenomena tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menangani dampak urban sprawl di Kecamatan Cibiru Kota Bandung?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan dalam penanganan dampak urban sprawl di Kecamatan Cibiru;
2. Mengidentifikasi formulasi tujuan yang ingin dicapai untuk melakukan penanganan dampak urban sprawl di Kecamatan Cibiru; dan
3. Menyusun pemetaan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penanganan dampak urban sprawl di Kecamatan Cibiru.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode analisis MACTOR dengan menggunakan pendekatan normatif. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berjumlah 9 orang. Dengan teknik pengambilan sampel yaitu Purposive Sampling diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah kuesioner, wawancara, observasi, dan studi pustaka.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari adanya identifikasi aktor dan tujuan tersebut dapat dinilai tingkat pengaruh aktor sampai dengan mengukur sikap aktor terhadap tujuan yang akan dicapai tersebut. Sehingga, dapat dihasilkan *output* akhir yaitu Hubungan Aktor-Tujuan dalam menangani dampak *urban sprawl* di Kecamatan Cibiru yang diinterpretasikan menjadi sebuah tabulasi mulai dari aktor yang paling berpengaruh dan kurang berpengaruh. Selain itu, tabulasi akhir juga dilakukan untuk mengetahui tujuan-tujuan utama yang dapat dijadikan sebagai program utama pada penanganan dampak *urban sprawl* di Kecamatan Cibiru.

Dalam menangani permasalahan kota seperti dampak *urban sprawl* di Kecamatan Cibiru diperlukannya peran *stakeholder* terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah melakukan upaya untuk meminimalisir dampak negatif yang timbul. Upaya yang dilakukan dalam rangka menangani dampak *urban sprawl* di Kecamatan Cibiru yaitu dengan melakukan penghijauan kembali pada beberapa titik di Kecamatan Cibiru. Hasil akhir dari analisis MACTOR dapat dilihat pada Tabel 1 Matriks Hubungan Tujuan-Aktor (3MAO) dalam Menangani Dampak *Urban Sprawl* di Kecamatan Cibiru.

Tabel 1. Matriks Hubungan Tujuan-Aktor (3MAO) dalam Menangani Dampak *Urban Sprawl* di Kecamatan Cibiru

3MAO	TTR	PDP	STR	PPP	PKLP	PRTH	EP	KKALP	PIRTR	Mobilisation
BALITBANG	6.4	1.6	4.8	3.2	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	40
BPN BDG	5.7	1.4	-5.7	4.3	2.8	5.7	2.8	1.4	4.3	34
DCPTBINTAR	4.7	-4.7	3.6	-2.4	1.2	2.4	3.6	3.6	1.2	27.2
DPU BDG	1.8	3.5	2.6	-0.9	0.9	0.9	3.5	1.8	1.8	17.5
DKPP BDG	-2.2	-2.2	-2.2	-3.3	-2.2	-2.2	-3.3	-2.2	-2.2	22
DPKP3 BDG	0.8	-2.5	0.8	2.5	2.5	2.5	2.5	1.7	3.3	19.2
DLH BDG	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	-1.6	1.6	14.4
DISDUK BDG	-0.3	1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	3.7
KCIBIRUBDG	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	30.4
Number of agreements	24.4	12.5	16.8	14.9	17.2	21.2	22.2	16.6	20.3	
Number of disagreements	-2.5	-9.4	-8.2	-6.9	-2.5	-2.5	-3.6	-4.1	-2.5	
Degree of mobilisation	26.9	22	25	21.8	19.7	23.7	25.8	20.7	22.9	

Sumber: Hasil Analisis MACTOR, 2022

Identifikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan dalam penanganan dampak *urban sprawl* di Kecamatan Cibiru

Dari hasil akhir analisis MACTOR diatas dapat diketahui urutan aktor yang paling berpengaruh. Hal tersebut ditunjukkan pada kolom "*mobilisation*" yaitu urutan nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah menunjukkan aktor yang paling berpengaruh sampai aktor yang kurang berpengaruh. Hasil urutan aktor yang memiliki pengaruh tertinggi sampai dengan terendah dapat dilihat pada Tabel 2. Urutan Aktor dalam Menangani Dampak *Urban Sprawl* di Kecamatan Cibiru.

Tabel 2. Urutan Aktor dalam Menangani Dampak *Urban Sprawl* di Kecamatan Cibiru

Rangking	Aktor	Nilai Mobilisasi	Keterangan
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung	40	Sebagaimana fakta dilapangan bahwa peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini sebagai eksekutor atau aktor utama yang menetapkan suatu kebijakan lingkup perencanaan pembangunan serta pengembangan kota. Sehingga, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya tidak akan dapat menyesuaikan Tugas, Pokok, dan Fungsi dengan program kerjanya masing-masing tanpa ditetapkannya suatu kebijakan dari Pemerintah Kota.
2	Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung	34	Pada kondisi dilapangan Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung terlibat dalam melakukan pertimbangan teknis pertanahan untuk menghindari adanya alih fungsi lahan pertanian terutama lahan milik Pemerintah Daerah sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri ATR No. 12 Tahun 2021.
3	Kecamatan Cibiru	30.4	Kecamatan Cibiru memiliki tingkat pengaruh langsung yang tinggi karena bentuk keterlibatannya dalam menangani dampak dari urban sprawl di Kecamatan Cibiru yaitu melakukan koordinasi langsung dengan lingkup kewilayahan dalam penyelenggaraan teknis terkait perencanaan, pembangunan, ataupun administrasi wilayah. serta, memiliki keterkaitan secara langsung juga dalam membina dan memfasilitasi masyarakat.
4	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Kota Bandung	27.2	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Ciptabintar) Kota Bandung dalam menangani dampak dari urban sprawl di Kecamatan Cibiru dilibatkan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan terkait penataan ruang perkotaan terutama dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang yang dijadikan sebagai acuan dalam merencanakan sebuah kota agar dapat mewujudkan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung	22	Peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung dalam menangani permasalahan ini yaitu mempertahankan lahan peruntukkan pertanian yang lahannya dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung, agar meminimalisir tumbuhnya bangunan-bangunan liar pada lahan yang tidak semestinya dibangun. Sehingga, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung cukup berpengaruh dalam menangani dampak <i>urban sprawl</i> di Kecamatan Cibiru.
6	DPKP3 Kota Bandung	19.2	Bentuk keterlibatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung dalam menangani dampak dari urban sprawl di Kecamatan Cibiru yaitu seperti melakukan penyeimbangan antara kebutuhan rumah hunian dengan kebutuhan fasilitas penunjang lainnya.

Rangking	Aktor	Nilai Mobilisasi	Keterangan
7	Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung	17.5	Bentuk keterlibatan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Bandung dalam menangani dampak dari urban sprawl di Kecamatan Cibiru memang belum terlalu banyak selain penyelenggaraan prasarana ataupun infrastruktur lainnya disertai dengan adanya kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di Kota Bandung. Sehingga, pengaruh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Bandung terhadap penanganan dampak <i>urban sprawl</i> di Kecamatan Cibiru itu tidak terlalu tinggi.
8	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung	14.4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dalam menangani dampak dari urban sprawl di Kecamatan Cibiru dilibatkan dalam pengawasan dokumen terkait lingkungan dan penanganan limbah terutama limbah rumah tangga karena semakin berkembangnya suatu kawasan maka penanganan limbah semakin meningkatnya. Contohnya yaitu akan semakin banyak sampah yang dihasilkan oleh masyarakat yang tertinggal di kawasan tersebut maka diperlukannya peningkatan fasilitas pengelola sampah. sehingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dalam penanganannya tidak memiliki pengaruh yang tinggi. Namun, jika pada masa mendatang <i>urban sprawl</i> belum teratasi maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan memiliki pengaruh yang tinggi.
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung	3.7	Keterkaitan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan dampak yang ditimbulkan dari fenomena urban sprawl di Kecamatan Cibiru hanya sebatas melakukan pendataan administrasi penduduk guna mengetahui dinamika penduduk di Kecamatan Cibiru yang dapat menjadi akibat utama dari timbulnya fenomena tersebut. sehingga, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tingkat pengaruh terendah dibandingkan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Pada urutan diatas dapat terlihat bahwa 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah(OPD) lainnya yang memiliki pengaruh tertinggi dalam menangani dampak *urban sprawl* di Kecamatan Cibiru diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung; Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung; dan Kecamatan Cibiru. Hal tersebut diurutkan dari nilai mobilisasi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disertai dengan peranannya di lapangan dalam menangani dampak *urban sprawl* di Kecamatan Cibiru.

Identifikasi formulasi tujuan yang ingin dicapai untuk melakukan penanganan dampak *urban sprawl* di Kecamatan Cibiru

Hasil akhir analisis MACTOR pun menunjukkan tujuan-tujuan utama yang dapat dijadikan program utama dalam menangani dampak *urban sprawl* di Kecamatan Cibiru. Dimana, urutan tujuan yang paling utama ditunjukkan pada baris “*degree of mobilisation*”. Dampak *urban sprawl* di Kecamatan Cibiru akan diatasi dengan mencapai beberapa tujuan yang telah ditetapkan diantaranya Tertib Tata Ruang, Pengendalian Dinamika Penduduk, Sosialisasi Tata Ruang, Peningkatan Perekonomian Perkotaan, Pengendalian Konversi Lahan Pertanian, Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, Efisiensi Pembangunan, Koordinasi dan Konsultasi antar lembaga pemerintah, dan Pengawasan Implementasi Rencana Tata Ruang. Hasil urutan tujuan utama yang berpotensi menjadi program utama dapat dilihat pada Tabel 3. Urutan Tujuan dalam Menangani Dampak *Urban Sprawl* di Kecamatan Cibiru.

Tabel 3. Urutan Tujuan dalam Menangani Dampak *Urban Sprawl* di Kecamatan Cibiru.

Ran gkin g	Tujuan	Nilai <i>Degree of Mobilisation</i>	Keterangan
1	Tertib Tata Ruang	26.9	Tujuan ini bermaksud sosialisasi kepada masyarakat mengenai ditetapkannya Kecamatan Cibiru sebagai daerah untuk intensifikasi lahan tanaman pangan.
2	Efisien si Pemb nguan	25.8	Tujuan ini bermaksud untuk mewujudkan efisiensi kebutuhan perumahan dan permukiman.
3	Sosialis asi Tata Ruang	25	Tujuan ini bermaksud sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya fenomena urban sprawl di Kecamatan Cibiru.
4	Pemeli haraan Ruang Terbuk a Hijau	23.7	Tujuan ini bermaksud melakukan upaya pengendalian alih fungsi lahan yang berakibat pada kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Bandung
5	Penga wasan Implem entasi Rencan a Tata Ruang	22.9	Tujuan ini bermaksud untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam melakukan pengawasan implementasi rencana tata ruang
6	Pengen dalian Dinami ka Pendud uk	22	Tujuan ini bermaksud melakukan penekanan terhadap angka kelahiran dan urbanisasi.
7	Pening katan Pereko nomian Perkota an	21.8	Tujuan ini bermaksud untuk mewujudkan peningkatan perekonomian dalam bidang perumahan dan permukiman.

Ran gkin g	Tujuan	Nilai <i>Degree of Mobili sation</i>	Keterangan
8	Koordinasi dan Konsultasi antar lembaga pemerintah	20.7	Tujuan ini bermaksud untuk mewujudkan komunikasi yang baik antar lembaga dalam pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan pertanian
9	Pengendalian Konversi Lahan Pertanian	19.7	Tujuan ini bermaksud melakukan upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian sawah yang beririgasi baik ke non-pertanian.

Dapat dilihat pada hasil tabulasi diatas bahwa 3 (tiga) tujuan utama yang memiliki nilai ketersetujuan tertinggi yaitu tujuan Tertib Tata Ruang, Efisiensi Pembangunan, dan Sosialisasi Tata Ruang. Berarti, ketiga tujuan tersebut dapat dijadikan sebagai program utama dalam menangani dampak *urban sprawl* di Kecamatan Cibiru. Tujuan “Tertib Tata Ruang” memiliki nilai ketersetujuan tertinggi dibandingkan tujuan lainnya artinya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengutamakan adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai ditetapkannya Kecamatan Cibiru sebagai daerah untuk intensifikasi lahan tanaman pangan. Dengan mencapai tujuan tersebut, pemanfaatan ruang di Kecamatan Cibiru pada masa mendatang akan lebih sesuai dengan Rencana Pola Ruang yang telah di tetapkan dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung.

Pemetaan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penanganan dampak *urban sprawl* di Kecamatan Cibiru

Peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menangani dampak *urban sprawl* di Kecamatan Cibiru dipetakan berdasarkan fokus masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap tujuan yang ingin dicapainya. Dari hasil pemetaan tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung merupakan aktor yang paling fokus terhadap tujuan yang berkaitan dengan pengendalian dinamika penduduk. Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bandung sebagai aktor utama yang menjadi eksekutor atau penyusun kebijakan dalam hal ini lebih mendukung tujuan seperti Koordinasi dan Konsultasi antar lembaga pemerintah dengan artian mewujudkan komunikasi yang baik antar lembaga dalam pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Hasil pemetaan Hubungan Antara Tujuan dengan Aktor dalam Menangani Dampak *Urban Sprawl* di Kecamatan Cibiru dirincikan dalam bentuk tabel dibawah ini.

Tabel 4. Hasil pemetaan Hubungan Antara Tujuan dengan Aktor dalam Menangani Dampak *Urban Sprawl* di Kecamatan Cibiru

Kuadran	Aktor	Tujuan
I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung 2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung 3. Kecamatan Cibiru 	Pengendalian Dinamika Penduduk
II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung 2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung 	Sosialisasi Tata Ruang
III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bandung 2. Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Kota Bandung 	<ul style="list-style-type: none"> - Efisiensi Pembangunan - Koordinasi dan Konsultasi antar Lembaga Pemerintah
IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPKP3 Kota Bandung 2. Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung 	<ul style="list-style-type: none"> - Tertib Tata Ruang, - Peningkatan Perekonomian Perkotaan - Pengendalian Konversi Lahan Pertanian - Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, - Pengawasan Implementasi Rencana Tata Ruang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis MACTOR yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki pengaruh tertinggi dan 3 (tiga) tujuan utama yang memiliki nilai kesepakatan tertinggi, diantaranya:

Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki pengaruh tertinggi dalam menangani dampak *urban sprawl* di Kecamatan Cibiru:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini memiliki nilai tertinggi dalam urutan pertama dengan nilai mobilisasi pada Matriks Hubungan Tujuan-Aktor (3MA0) sebesar 40 artinya fakta dilapangan juga menunjukkan bahwa peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini sebagai eksekutor atau aktor utama yang menetapkan suatu kebijakan lingkup perencanaan pembangunan serta pengembangan kota.
2. Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini memiliki nilai tertinggi dalam urutan pertama dengan nilai mobilisasi pada Matriks Hubungan Tujuan-Aktor (3MA0) sebesar 34 artinya peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini melakukan pertimbangan teknis pertanahan untuk menghindari adanya alih fungsi lahan pertanian terutama lahan milik Pemerintah Daerah sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri ATR No. 12 Tahun 2021 sangat penting terhadap penanganan dampak *urban sprawl* di Kecamatan Cibiru.
3. Kecamatan Cibiru. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini memiliki nilai tertinggi dalam urutan pertama dengan nilai mobilisasi pada Matriks Hubungan Tujuan-Aktor

(3MA0) sebesar 30,4 artinya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini memiliki pengaruh langsung yang tinggi karena bentuk keterlibatannya dalam menangani dampak dari urban sprawl di Kecamatan Cibiru yaitu melakukan koordinasi langsung dengan lingkup kewilayahan dalam penyelenggaraan teknis terkait perencanaan, pembangunan, ataupun administrasi wilayah.

Tiga tujuan utama yang memiliki nilai kesepakatan tertinggi serta dapat dijadikan sebagai program utama dalam menangani dampak *urban sprawl* di Kecamatan Cibiru, diantaranya:

1. Tertib Tata Ruang. Tujuan ini memiliki nilai tertinggi dalam urutan pertama dengan nilai *degree of mobilisation* pada Matriks Hubungan Tujuan-Aktor (3MA0) sebesar 26,9. Tujuan ini bermaksud sosialisasi kepada masyarakat mengenai ditetapkan Kecamatan Cibiru sebagai daerah untuk intensifikasi lahan tanaman pangan.
2. Efisiensi Pembangunan. Tujuan ini memiliki nilai tertinggi dalam urutan pertama dengan nilai *degree of mobilisation* pada Matriks Hubungan Tujuan-Aktor (3MA0) sebesar 25,8. Tujuan ini bermaksud mewujudkan efisiensi kebutuhan perumahan dan permukiman.
3. Sosialisasi Tata Ruang. Tujuan ini memiliki nilai tertinggi dalam urutan pertama dengan nilai *degree of mobilisation* pada Matriks Hubungan Tujuan-Aktor (3MA0) sebesar 25. Tujuan ini bermaksud sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya fenomena *urban sprawl* di Kecamatan Cibiru.

Acknowledge

Peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Universitas Islam Bandung serta Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah memberikan peneliti banyak ilmu sehingga dapat terselesaikannya penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Fauzy, A., 2019. *Teknis Analisis Berkelanjutan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- [2] Muaziz, D., 2018. *Pengaruh Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Pasal 14 Terhadap Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.
- [3] Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017, 2017. *Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*.
- [4] Widiawaty, M.A., Dede, M., Ismail, A., 2018. *Analisis Tipologi Urban sprawl Di Kota Bandung Menggunakan Sistem Informasi Geografis*, in: Seminar. Presented at the Seminar Nasional Geomatika 2018: Penggunaan dan Pengembangan Produk Informasi Geospasial Mendukung Daya Saing Nasional, Universitas Pendidikan Indonesia. Widiawaty, M.A., Dede, M., Ismail, A., 2018. *Analisis Tipologi Urban sprawl Di Kota Bandung Menggunakan Sistem Informasi Geografis*, in: Seminar. Presented at the Seminar Nasional Geomatika 2018: Penggunaan dan Pengembangan Produk Informasi Geospasial Mendukung Daya Saing Nasional, Universitas Pendidikan Indonesia.
- [5] M. F. Rahman and I. S. Darwin, "Persepsi Pemilik Bangunan dalam Melestarikan Bangunan Cagar Budaya di Kawasan Braga Kota Bandung," pp. 76–85, 2022.